LAMPIRAN

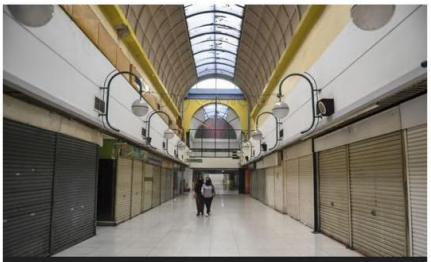
Lampiran 1. Gambar Berita 1

Pengamat Lihat Ada Tantangan Ekonomi Serius di Kinerja APBN 2025

Ihfa Firdausya

22/9/2025 18:35

A- A+



Ilustrasi(Antara)

Paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025, Senin (22/9), dinilai mengindikasikan masih adanya tantangan ekonomi yang serius. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut mencontohkan tekanan pada penerimaan PPN dan PPh badan.

"*Perfect storm* masih berlanjut, tercermin dari tekanan penerimaan PPN yang berarti konsumsi melambat, dan PPh badan artinya perusahaan khususnya manufaktur alami penurunan laba," kata Bhima kepada *Media Indonesia*, Senin (22/9).

Iklan pengumuman

Baca juga :
Pemerintah Sepakat tidak Ada Tax Amnesty Lagi

Menteri Keuangan juga melaporkan defisit APBN 2025 per 31 Agustus sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Paparan Purbaya mengindikasikan adanya tantangan ekonomi yang serius sehingga dibutuhkan fiskal yang ekspansif tahun 2026. Yang terpenting sekarang adalah skala prioritas dimana fiskal ekspansif untuk jawab kebutuhan industri padat karya, UMKM, dan konsumen kelompok menengah ke bawah," ungkap Bhima.

Ia juga mendorong menteri keuangan lebih berani menggeser anggaran program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) yang serapannya masih rendah, atau alokasi ke Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih yang berisiko tinggi.

Baca juga :
Menkeu Purbaya Tolak Wacana Tax Amnesty Baru

"Di sini peran Purbaya diuji. Fiskal ekspansif tidak sekedar belanja pemerintah makin besar dan defisit melebar namun berkaitan dengan kualitas pemulihan motor ekonomi," tegas Bhima.

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 31 Agustus tercatat Rp416,49 triliun atau turun 11,5% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi pajak penghasilan (PPh) Badan tercacat sebesar Rp194,2 triliun atau turun 8,7% dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan 8 September 2025 telah melayani 22,7 juta penerima. Sementara jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) 7.644. Adapun serapan realisasi anggaran untuk MBG per 8 September adalah Rp13 triliun atau 18,3% dari pagu Rp71 triliun.

"Jumlah ini terus meningkat dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis. Sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/9).

Lampiran 2. Gambar Berita 2

KOMPAS.com JERNIH MELIHAT DUNIA

Dampak Guyuran Rp 200 Triliun Dana Pemerintah ke Bank terhadap Perekonomian

Kompas.com, 12 September 2025, 13:17 WIB

Baca di App

10 Add on Google 28



DALAM dunia perekonomian, uang sering kali dianalogikan sebagai darah atau oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh. Ketika aliran itu macet, tubuh akan melemah.

Begitu pula dengan ekonomi, ketika likuiditas seret, aktivitas bisnis melambat, investasi tertunda, konsumsi menurun, bahkan bisa

Namun, kebijakan sebesar ini tentu tidak sekadar angka. Dampaknya bisa melebar, dari sektor perbankan, dunia usaha, konsumsi masyarakat, hingga pembangunan nasional.

Pertanyaannya, apakah guyuran dana sebesar Rp 200 triliun ini benar-benar efektif untuk menggerakkan roda ekonomi? Atau justru akan menimbulkan risiko baru, seperti moral hazard atau inflasi?

KOMPAS.com JERNIH MELIHAT DUNIA

Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan fiskal, serta kebutuhan pembiayaan dalam negeri, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menggelontorkan dana sekitar Rp 200 triliun ke perbankan.

Tujuannya sederhana, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan likuiditas bank, sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Banyak orang awam bertanya, mengapa dana sebesar itu ditaruh di bank, bukan langsung dibagikan ke rakyat atau untuk pembangunan infrastruktur? Jawabannya terletak pada fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Bank adalah perantara antara pemilik dana (deposan) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Dalam konteks ekonomi modern, hampir semua transaksi ekonomi melewati bank.

Dana Rp 200 triliun ini tidak diberikan begitu saja, melainkan dalam bentuk penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk memperkuat likuiditas.

Pemerintah berharap, setiap rupiah yang ditempatkan di bank bisa "berlipat ganda" melalui efek pengganda kredit (*credit multiplier*). Misalnya, dana Rp 200 triliun bisa mendorong kredit hingga Rp 600 triliun– Rp 800 triliun ke masyarakat dan dunia usaha.

Ada sejumlah dampak jangka pendek dari kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Jika bank mengalami kekurangan likuiditas, maka terdapat akibat yang dapat terjadi mulai dari kredit macet akan meningkat, usaha kecil dan menengah (UMKM) kesulitan modal, perusahaan besar menunda investasi, hingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Dengan kata lain, bank adalah urat nadi ekonomi. Menjaga kesehatan bank berarti menjaga kelangsungan ekonomi secara keseluruhan.

Pertama, likuiditas bank menguat. Dengan tambahan dana Rp 200 triliun, bank memiliki cadangan likuiditas yang lebih longgar.

Hal ini membuat mereka lebih percaya diri untuk menyalurkan kredit, menurunkan bunga pinjaman, dan mempercepat proses restrukturisasi kredit macet.

Kedua, kepercayaan publik terjaga. Di saat ketidakpastian global, masyarakat sering kali khawatir dengan kondisi perbankan. Dana pemerintah yang besar ini menjadi semacam "sinyal kepercayaan" bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dampak ketiga ialah penurunan suku bunga. Dengan likuiditas longgar, bank tidak perlu bersaing keras menarik dana masyarakat melalui deposito berbunga tinggi.

Dampak ketiga ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut perhitungan ekonom, jika Rp 200 triliun dana pemerintah benar-benar mengalir ke sektor produktif, maka pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak sekitar 0,5 - 1 persen poin dalam setahun.

Dampak jangka menengah keempat ialah meningkatkan penerimaan pajak. Ketika aktivitas usaha meningkat, transaksi bertambah, keuntungan naik, otomatis pajak yang dipungut negara juga bertambah.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak sekadar mengurangi beban fiskal, tapi juga bisa menjadi sumber pendapatan baru.

Dalam jangka panjang kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan pula terhadap perekonomian.

UMKM bisa memperluas usaha, industri bisa meningkatkan produksi, petani bisa membeli pupuk, dan sektor konstruksi bisa menyerap tenaga kerja.

Dampak kedua ialah efek pengganda terhadap perekonomian. Setiap kredit yang disalurkan tidak berhenti di satu titik.

Misalnya, seorang pengusaha kuliner mendapat pinjaman Rp 500 juta. Ia gunakan untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, memperluas gerai.

Uang itu kemudian berputar ke petani, pemasok, hingga konsumen akhir. Dengan cara inilah ekonomi bergerak meluas.

KOMPAS.com JERNIH MELIHAT DUNIA SEPAK TAKULER BOLA BERSUARA

Akibatnya, suku bunga deposito cenderung turun, dan diikuti penurunan bunga kredit. Hal ini baik bagi dunia usaha karena biaya modal menjadi lebih murah.

Baca juga: Gen Z Menantang Politik Usang

Dampak terakhir ialah pada stabilisasi rupiah. Dana segar di perbankan membuat pasar valas lebih tenang. Ketika bank tidak panik mencari dolar, kurs rupiah bisa lebih stabil. Stabilitas rupiah akan menjaga inflasi dan meningkatkan kepercayaan investor asing.

Sedangkan dalam jangka menengah, ada beberapa dampak terhadap ekonomi.

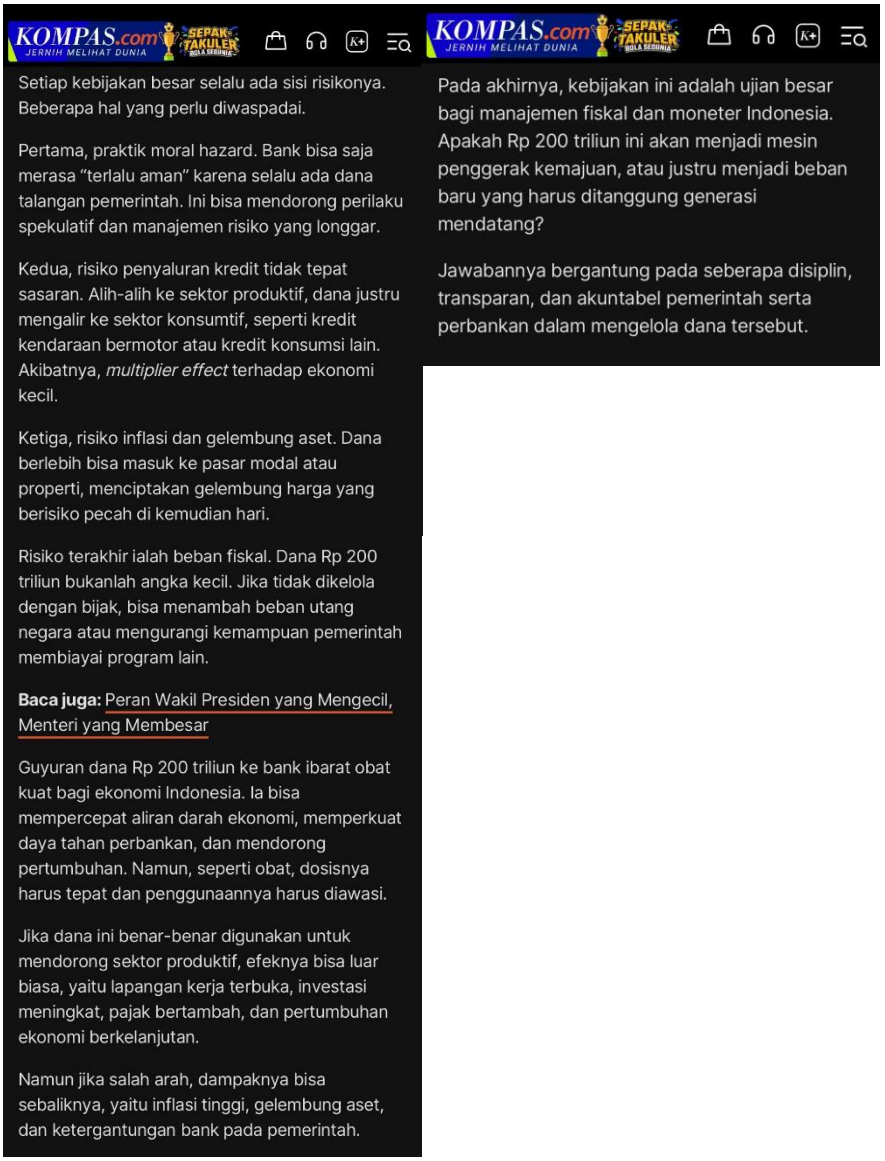
Dampak pertama ialah dorongan ke sektor riil. Jika bank menyalurkan kredit ke sektor produktif (UMKM, industri manufaktur, pertanian, dan infrastruktur), maka roda ekonomi akan berputar lebih cepat.

Pertama, menciptakan stabilitas sistem keuangan. Bank yang sehat akan menciptakan sistem keuangan yang kokoh. Dengan cadangan likuiditas cukup, bank lebih tahan menghadapi guncangan global, misalnya krisis keuangan atau gejolak pasar modal.

Kedua, kebijakan ini akan meningkatkan inklusi keuangan. Jika penyaluran kredit diarahkan ke UMKM dan masyarakat kecil, maka lebih banyak orang yang terlibat dalam sistem keuangan formal. Inklusi keuangan yang meningkat akan memperkuat basis ekonomi nasional.

Dampak ketiga ialah akan mendorong investasi. Investor asing melihat adanya komitmen pemerintah menjaga sektor perbankan. Hal ini meningkatkan kepercayaan untuk menanamkan modal di Indonesia, baik melalui pasar modal maupun investasi langsung.

Dampak terakhir ialah potensi risiko inflasi. Di sisi lain, ada potensi negatif. Jika dana Rp 200 triliun terlalu banyak mengalir ke konsumsi, sementara produksi tidak mampu mengimbanginya, maka harga-harga bisa melonjak. Inflasi yang terlalu tinggi justru akan menggerus daya beli masyarakat.



Setiap kebijakan besar selalu ada sisi risikonya. Beberapa hal yang perlu diwaspadai.

Pertama, praktik moral hazard. Bank bisa saja merasa "terlalu aman" karena selalu ada dana talangan pemerintah. Ini bisa mendorong perilaku spekulatif dan manajemen risiko yang longgar.

Kedua, risiko penyaluran kredit tidak tepat sasaran. Alih-alih ke sektor produktif, dana justru mengalir ke sektor konsumtif, seperti kredit kendaraan bermotor atau kredit konsumsi lain. Akibatnya, *multiplier effect* terhadap ekonomi kecil.

Ketiga, risiko inflasi dan gelembung aset. Dana berlebih bisa masuk ke pasar modal atau properti, menciptakan gelembung harga yang berisiko pecah di kemudian hari.

Risiko terakhir ialah beban fiskal. Dana Rp 200 triliun bukanlah angka kecil. Jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menambah beban utang negara atau mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program lain.

Baca juga: Peran Wakil Presiden yang Mengecil, Menteri yang Membesar

Guyuran dana Rp 200 triliun ke bank ibarat obat kuat bagi ekonomi Indonesia. Ia bisa mempercepat aliran darah ekonomi, memperkuat daya tahan perbankan, dan mendorong pertumbuhan. Namun, seperti obat, dosisnya harus tepat dan penggunaannya harus diawasi.

Jika dana ini benar-benar digunakan untuk mendorong sektor produktif, efeknya bisa luar biasa, yaitu lapangan kerja terbuka, investasi meningkat, pajak bertambah, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Namun jika salah arah, dampaknya bisa sebaliknya, yaitu inflasi tinggi, gelembung aset, dan ketergantungan bank pada pemerintah.

Pada akhirnya, kebijakan ini adalah ujian besar bagi manajemen fiskal dan moneter Indonesia. Apakah Rp 200 triliun ini akan menjadi mesin penggerak kemajuan, atau justru menjadi beban baru yang harus ditanggung generasi mendatang?

Jawabannya bergantung pada seberapa disiplin, transparan, dan akuntabel pemerintah serta perbankan dalam mengelola dana tersebut.

Lampiran 3. Gambar Berita 3

E-Paper MEDIA INDONESIA

PBSI Minta Maaf, Hasil di Piala Thomas 2026 Jadi Evaluasi

Home › Ekonomi

Ekonom: Defisit APBN Januari 0,21% Akibat Percepatan Belanja di Awal Tahun

Ihfa Firdausya

23/2/2026 15:28 A- A+



Ilustrasi(Dok Litbang MI)

DEFISIT APBN 2026 Per 31 Januari sebesar 0,21% dari produk domestik bruto (PDB) dinilai masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menyebut defisit tersebut terjadi karena pemerintah menggenjot belanja di awal tahun.

Berlangganan koran digital

"Defisit fiskal Indonesia berada di angka Rp54,6 triliun (-0,21% dari PDB; 7,9% dari anggaran) karena percepatan pengeluaran terjadi lebih awal," kata Hosianna dalam keterangan yang

Ke depan, pemerintah menargetkan pengeluaran fiskal sebesar Rp809 triliun (+30,4% YoY) dengan belanja modal sebesar Rp 90 triliun untuk Koperasi Merah-Putih, investasi hilir Danantara sebesar Rp110 triliun, dan program belanja berjalan sebesar Rp129 triliun. Selain itu bonus Idul Fitri sebesar Rp55 triliun untuk pegawai negeri dan stimulus khusus kuartal pertama tahun 2026 sebesarRp 15,01 triliun.

Referensi Geografis

Hosianna menyebut sejumlah faktor akan mempengaruhi APBN pada jangka pendek. Misalnya realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.

Selain itu pembayaran kompensasi untuk Pertamina yang akan dibayarkan sebulan sekali mulai tahun ini, dengan pembayaran terakhir pada Oktober 2025 untuk kompensasi kuartal pertama 2025.

Kemudian operasi kilang Balikpapan, yang meningkatkan kapasitas produksi sebesar 100 ribu barel/hari. Terakhir audit restitusi PPN yang berkelanjutan yang memperketat persyaratan dan meningkatkan angka penerimaan pajak bersih (+7,7% YoY Bruto, 84% YoY Netto).

"Secara kolektif, tren-tren ini memperkuat realisasi defisit dalam batas aman, mencerminkan pengeluaran yang secara struktural lebih kuat daripada pemulihan pendapatan. Dengan ekspansi fiskal yang diaktifkan, ini merupakan dorongan positif bagi pertumbuhan domestik, yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan ritel, makanan & minuman, pertanian, dan otomotif," pungkasnya. (H-2)

Lampiran 4. Gambar Berita 4

KOMPAS.com JERNIH MELIHAT DUNIA SEPAK TAKULER BOLA SEDUNIA

Defisit APBN Rp 54,6 T di Januari 2026, Purbaya: Masih Terkendali

Kompas.com, 23 Februari 2026, 12:28 WIB

Baca di App

Debrinata Rizky, Sakina Rakhma Diah Setiawan
Tim Redaksi

Add on Google

1



JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga 31 Januari 2026 mencatat defisit Rp 54,6 triliun. Angka ini setara 0,21 persen dari produk domestik bruto.

Adapun pada bulan sebelumnya, defisit APBN tercatat di angka Rp 695,1 triliun. Angka tersebut setara 2,92 persen dari produk domestik bruto.

"Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi posisi defisit APBN tercatat Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB, angka ini masih sangat terkendali," ujar Purbaya dalam Konferensi *Pers* APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin

Pendapatan negara hingga Januari 2026 tercatat Rp 172,7 triliun. Realisasi ini setara 5,5 persen dari *outlook* pendapatan negara tahun ini sebesar Rp 3.153,6 triliun.

Capaian tersebut ditopang penerimaan perpajakan Rp 138,9 triliun. Adapun penerimaan negara bukan pajak menyumbang Rp 33,9 triliun.

Penerimaan pajak terealisasi Rp 116,2 triliun atau 4,9 persen dari target Rp 2.357,7 triliun. Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 22,6 triliun atau 6,7 persen dari target.

Belanja negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun.

Baca juga: Purbaya Tolak Ubah Batas Defisit Meski Kejar Pertumbuhan Tinggi

Angka ini setara 5,9 persen dari *outlook* belanja negara Rp 3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 131,9 triliun atau 4,2 persen. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp 95,3 triliun atau 13,8 persen.

Pemerintah mengarahkan belanja pada program prioritas. Fokus diarahkan pada menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi lintas sektor.

Purbaya menyebut keseimbangan primer juga alami defisit Rp 4,2 triliun. *Outlook* keseimbangan primer sebelumnya dirancang defisit Rp 89,7 triliun.

Baca juga: Purbaya Optimistis Tekan Defisit APBN, Reformasi Pajak Jadi Tumpuan

Defisit APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan

Lampiran 5. Gambar Berita 5



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).(Antara/Dhemas Reviyanto)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), yang resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang.

"APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan," ujar Menkeu.

APBN 2026 juga menegaskan visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab dinamika global dan aspirasi masyarakat.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPR, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menyetujui RUU APBN 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Dengan demikian, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama seluruh anggota dewan dalam proses pembahasan yang berlangsung konstruktif. (Ifa/E-1)

Lampiran 6. Gambar Berita 6

KOMPAS.com JERNIH MELIHAT DUNIA

IKN dan Pemindahan Ibu Kota Baru • IKN Dinamika dan Progres Pembangunannya

Purbaya Pastikan Duit Negara untuk IKN Tetap Mengalir

Kompas.com, 24 September 2025, 09:18 WIB

Baca di App

Hilda B Alexander
Penulis

4 Add on Google 10



Sumber: Antara

NUSANTARA, KOMPAS.com - Keraguan publik soal berlanjut tidaknya pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terjawab sudah.

Hal ini menyusul penegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN masih akan berlanjut, bahkan "lebih cepat lagi" pada tahun anggaran 2026.

Meskipun besaran pasti anggaran belum dirinci, pernyataan ini memberikan kepastian bagi kelanjutan proyek.

Baca juga: Perpres 79 Tahun 2025 Redam Polemik soal Nasib IKN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 6,3 triliun untuk IKN dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 yang sebesar Rp 4,7 triliun.

Fase Baru Pembangunan IKN

Pengalokasian dana APBN ini bukan hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan momentum.

Purbaya menjelaskan, tujuan utama dari investasi pemerintah ini adalah untuk menarik pihak swasta.

Baca juga: IKN Menuju Ibu Kota Politik 2028, Ini Tahapannya

"Kami harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana," katanya, dikutip *Kompas.com*, Rabu (24/9/2025).

Artinya, pemerintah menggunakan APBN sebagai modal awal untuk membangun fondasi, menciptakan infrastruktur dasar, dan menunjukkan keseriusan proyek.

Setelah itu, diharapkan para investor swasta akan berbondong-bondong masuk, membawa modal dan inovasi untuk mengembangkan IKN lebih lanjut.

Pengembangan Kawasan

Meskipun anggaran tahunan untuk IKN terlihat menurun dari tahun-tahun sebelumnya, data menunjukkan adanya pergeseran fokus.

Baca juga: Bukan Sekadar Ibu Kota, IKN Jantung Politik Indonesia: Apa Artinya?

Total alokasi APBN untuk IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 75,8 triliun. Namun, pada RAPBN 2026, alokasi terbesar yakni Rp 5,71 triliun, ditujukan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sementara sisanya untuk dukungan manajemen.

Ini menandakan bahwa fase awal pembangunan infrastruktur fisik yang masif, seperti jalan dan gedung-gedung utama, sudah mulai bergeser ke fase pengembangan kawasan secara lebih holistik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Lampiran 7. Gambar Berita 7

E-Paper MEDIA INDONESIA

Thomas Cup 2026 Catat Sejarah Kelam Indonesia Sejak 1958

Home › Ekonomi

Defisit APBN Rp54,6 Triliun di Januari 2026 Dinilai Stimulus Terukur, Bukan Sinyal Krisis

Rahmatul Fajri

25/2/2026 20:46 A- A+



"Defisit ini bukan kegagalan, melainkan alat kebijakan. Belanja negara yang mencapai Rp227,3 triliun menunjukkan program prioritas seperti bantuan sosial, subsidi, dan transfer ke daerah dieksekusi cepat agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat pada triwulan pertama," ujar Bonar melalui keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Baca juga :
Pemerintah Didorong Akselerasi Belanja Negara

Berdasarkan data realisasi, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit. Bonar mengakui adanya jurang fiskal yang tercipta akibat ketimpangan laju pertumbuhan ini.

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Projo menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp54,6 triliun per 31 Januari 2026 merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Meski secara nominal lebih besar dibanding periode tahun lalu, angka tersebut dinilai masih dalam batas aman.

Ketua Bidang Ekonomi, Industri, dan Investasi DPP Projo, Bonar Sianturi, menjelaskan bahwa defisit setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ini mencerminkan strategi pemerintah dalam melakukan belanja agresif sejak dini.

"Tantangannya adalah struktur pendapatan kita masih sangat bergantung pada pajak dan PNBP komoditas yang rentan terhadap volatilitas harga global. Karena itu, reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak menjadi agenda yang mendesak untuk dipercepat," katanya.

Meskipun posisi fiskal Indonesia dinilai masih sehat, Bonar memberikan catatan kritis terkait kualitas belanja. Bonar menekankan bahwa defisit akan menjadi investasi masa depan jika diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur logistik dan kualitas SDM. Namun, risiko akan muncul jika anggaran hanya terserap pada program konsumtif jangka pendek.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah diingatkan untuk tetap waspada terhadap persepsi pasar obligasi. Lonjakan belanja yang tidak dibarengi percepatan pendapatan berpotensi meningkatkan penarikan utang dan menaikkan biaya bunga (yield).

"Investor akan melihat tren. Jika kebutuhan surat utang meningkat tajam tanpa efisiensi, biaya bunga pemerintah bisa membengkak. Koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter Bank Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Bonar.

Guna menjaga keberlanjutan ekonomi, Bonar menyodorkan empat rekomendasi utama kepada pemerintah. Pertama, pengendalian ritme belanja agar defisit tidak melebar tajam di semester kedua. Kedua, percepatan reformasi pendapatan melalui digitalisasi sistem perpajakan tanpa menaikkan tarif secara agresif.

Ketiga, manajemen utang yang pruden dengan diversifikasi sumber pembiayaan. Terakhir, evaluasi kualitas belanja dengan indikator kinerja yang transparan bagi publik.

"Defisit Januari ini adalah cermin pilihan kebijakan. Angka ini belum mengindikasikan bahaya, namun menjadi sinyal agar kita menjaga keseimbangan antara keberanian berbelanja dan kebijaksanaan mengelola risiko fiskal," pungkasnya. (H-2)

Lampiran 8. Gambar Berita 8

KOMPAS.com JERNIH MELIHAT DUNIA

Bank dan OJK Sambut Perpanjangan Dana SAL Rp 200 T, UMKM Diuntungkan?

Kompas.com, 27 Februari 2026, 09:48 WIB

Baca di App

Isna Rifka Sri Rahayu, Aprillia Ika
Tim Redaksi

Add on Google



JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun di perbankan hingga September 2026. Kebijakan ini dinilai akan menjaga likuiditas bank tetap longgar dan memberi ruang penurunan suku bunga kredit.

Perpanjangan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Penempatan dana SAL di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebelumnya berlangsung enam bulan sejak 13 September 2025 dan berakhir pada 13

Dengan perpanjangan itu, dana akan tetap berada di perbankan hingga 13 September 2026. Setelah itu, pemerintah akan mengevaluasi kembali kebutuhan perpanjangan selanjutnya.

Sebelumnya, dana Rp 200 triliun tersebut ditempatkan di BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, Bank Mandiri Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Pemerintah juga sempat menambah penempatan dana Rp 76 triliun ke Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.

Namun pada akhir 2025, dana tambahan itu ditarik kembali sebesar Rp 75 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk kebutuhan belanja negara.

Likuiditas Bertambah, Bunga Turun

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai kebijakan ini berdampak positif bagi sistem perbankan.

"Sebenarnya itu positif. Positif dalam pengertian begini, itu menambah likuiditas sudah pasti," kata Dian.

Menurut dia, tambahan likuiditas membuat persaingan antarbank dalam menghimpun dana menjadi berkurang. Bank tidak perlu lagi menawarkan suku bunga tinggi atau special rate untuk menarik dana masyarakat.

Baca juga: Pinjam Rp 500.000 Berujung Tagihan Rp 70 Juta, Nenek di Jombang Terancam Kehilangan Sertifikat Tanah

" Sekarang turun tuh rata-rata pendanaannya turun, rate-nya juga turun sebenarnya, secara agregat ya sudah turun," ujar Dian.

Ia menambahkan, tenor enam bulan sebelumnya dinilai kurang memadai untuk mendorong pembiayaan secara optimal, termasuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang umumnya bersifat tahunan.

Bank Siap Salurkan Kredit



Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, penempatan dana SAL membantu meningkatkan likuiditas dan memperluas pembiayaan.

"Jadi kami juga sebagai salah satu bank yang ditunjuk untuk dititipkan merasa senang lah," ujarnya saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menyebut dana Rp 10 triliun yang ditempatkan di BSI telah terserap penuh untuk pembiayaan sektor konsumer dan

"Penurunan dana pihak ketiga rate-nya kan juga masih relatif terbatas ya. Terbatas dalam artian sudah agresif, tapi masih di bawah dari penurunan BI rate sendiri. Nah ini yang kemudian harusnya bisa berdampak positif," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

"Pertama kali saya juga bertemu dengan Menteri Keuangan, bahwa 6 bulan tidak cukup. Karena saya kira tidak ada pembiayaan, termasuk pembiayaan ke UMKM tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Proyek itu pasti tahunan," ungkapnya.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, penempatan dana SAL membantu meningkatkan likuiditas dan memperluas pembiayaan.

"Jadi kami juga sebagai salah satu bank yang ditunjuk untuk dititipkan merasa senang lah," ujarnya saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menyebut dana Rp 10 triliun yang ditempatkan di BSI telah terserap penuh untuk pembiayaan sektor konsumer dan produktif.

Baca juga: Hakim MK Pertanyakan Urgensi MBG di Tengah Keterbatasan Layanan Pendidikan

"Kalau BSI sih seneng-seneng aja (dapat tambahan dana SAL). Jadi kita prinsipnya siap lah kalau memang ada amanah dari pemerintah BSI siap," ucapnya.

"Saya menilai kalau yang perpanjangan likuiditas dari Pak Menkeu kemarin ini dampaknya positif," ujarnya dalam acara Silaturahmi Bersama Media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

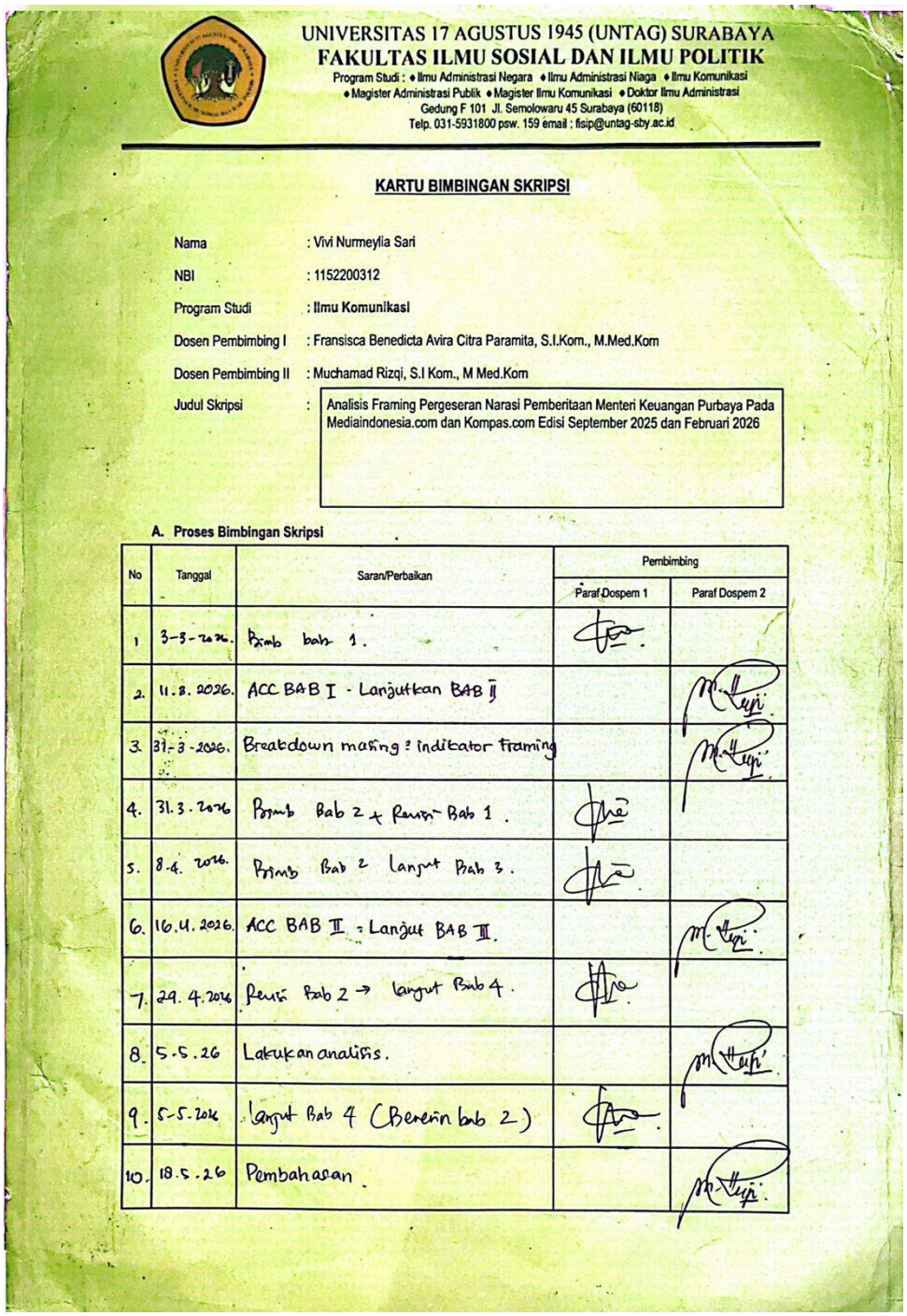
Baca juga: OJK: Penarikan Dana Pemerintah Rp 75 T Tak Ganggu Likuiditas Himbara

Menurut dia, tambahan likuiditas meredakan tensi perebutan dana antarbank, terutama di bank besar, dan membuka ruang pertumbuhan kredit yang diproyeksikan mencapai 9-10 persen secara tahunan tahun ini.

"Karena bisa dibayangin kalau misalnya pas jatuh tempo kemarin, kemudian ditarik, tentu akan kurang pas waktunya," kata Andry.

Ia menambahkan, meredanya persaingan dana pihak ketiga dapat membantu penurunan suku bunga perbankan, yang selama ini masih relatif tinggi dibanding penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Lampiran 9. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : ♦Ilmu Administrasi Negara ♦Ilmu Administrasi Niaga ♦Ilmu Komunikasi
♦Magister Administrasi Publik ♦Magister Ilmu Komunikasi ♦Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vivi Nurmeylia Sari
NBI : 1152200312
Program Studi : **Ilmu Komunikasi**
Dosen Pembimbing I : Fransisca Benedicta Avira Citra Paramita, S.I.Kom., M.Med.Kom
Dosen Pembimbing II : Muchamad Rizqi, S.I Kom., M Med.Kom
Judul Skripsi : Analisis Framing Pergeseran Narasi Pemberitaan Menteri Keuangan Purbaya Pada Mediaindonesia.com dan Kompas.com Edisi September 2025 dan Februari 2026

A. Proses Bimbingan Skripsi

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	3-3-2026.	Bimb bab 1.		
2.	11.3.2026.	ACC BAB I - Lanjutkan BAB II		
3.	31-3-2026.	Breakdown masing2 indikator framing		
4.	31.3.2026	Bimb Bab 2 + Revisi Bab 1.		
5.	8.4.2026.	Bimb Bab 2 Lanjut Bab 3.		
6.	16.4.2026.	ACC BAB II - Lanjut BAB III.		
7.	29.4.2026	Revisi Bab 2 → lanjut Bab 4.		
8.	5.5.26	Lakukan analisis.		
9.	5-5-2026	lanjut Bab 4 (Berenin bab 2)		
10.	18.5.26	Pembahasan.		

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : ♦ Ilmu Administrasi Negara ♦ Ilmu Administrasi Niaga ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
11.	20.5.2026	Revisi Bab 4.		
12.	22.5.2026	ACC BAB IV – Lanjut BAB V.		
13.	24-5-26	ACC BAB V (sidang).		
14.	2.6.2026	Revisi Bab 4		
15.	3-6-2026	ACC dengan Catatan.		

B. Bimbingan Artikel Ilmiah dan Poster Hasil Luaran Skripsi

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	20.5.2026	Poin 6. Luaran Artikel Ilmiah		
2.	20.5.2026	Substansi penulisan		

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
Tanggal : 3-6-2026

Dosen Pembimbing I,

(Fransiska Begadeta A.C.)

Dosen Pembimbing II

(Much. Rizqi)

Lampiran 10. Sertifikat SEMAKOM



Lampiran 11. Artikel Jurnal

ANALISIS *FRAMING* PERGESERAN NARASI PEMBERITAAN MENTERI KEUANGAN PURBAYA PADA MEDIAINDONESIA.COM DAN KOMPAS.COM

[1]Vivi Nurmeylia Sari, [2]Fransisca Benedicta Avira Citra Paramita, [3]Muchamad Rizqi
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
vivinurmeylia@gmail.com

Abstrak
Pergantian Menteri Keuangan Indonesia dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025 dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto memunculkan dinamika pemberitaan yang signifikan. Perbedaan orientasi redaksional antara Mediaindonesia.com dan Kompas.com menjadikan keduanya objek yang relevan untuk dikaji dalam perspektif analisis *framing*. Penelitian ini bertujuan menganalisis bingkai berita dan pergeseran narasi pemberitaan Menteri Keuangan Purbaya pada kedua media tersebut edisi September 2025 dan Februari 2026 menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menerapkan empat elemen *framing Entman problem identification, causal interpretation, moral evaluation*, dan *treatment recommendation* secara sistematis terhadap berita yang menjadi unit analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediaindonesia.com membangun narasi yang mendukung dan melegitimasi sosok Purbaya, dengan pergeseran dari narasi perkenalan figur baru pada September 2025 menuju narasi apresiasi kinerja pada Februari 2026. Kompas.com sebaliknya menghadirkan pemberitaan yang lebih kritis dan berimbang, bergeser dari kekhawatiran atas pergantian menteri menuju sorotan terhadap implementasi kebijakan fiskal. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan struktur kepemilikan dan orientasi redaksional sebagaimana dirumuskan dalam teori Ekonomi Politik Media Mosco. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *framing* media dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan kepentingan ideologis. Mediaindonesia.com yang berafiliasi dengan kelompok politik pendukung pemerintahan cenderung membangun narasi positif dan

legitimatif, sedangkan Kompas.com yang lebih independen mempertahankan fungsi kritis *jurnalisme* secara konsisten.
Kata Kunci: Analisis *Framing*, Pergeseran Narasi, Menteri Keuangan, Media Daring

Abstract

The transition of Indonesia's Minister of Finance from Sri Mulyani Indrawati to Purbaya Yudhi Sadewa in September 2025 within President Prabowo Subianto's cabinet sparked significant media coverage. The differences in editorial orientation between Mediaindonesia.com and Kompas.com make both outlets relevant subjects for examination from a framing analysis perspective. This study aims to analyze the news frames and shifts in the narrative coverage of Finance Minister Purbaya in both media outlets for the September 2025 and February 2026 editions using Robert N. Entman's framing model. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques involving observation and documentation. The analysis was conducted by systematically applying Entman's four framing elements—problem identification, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation—to the news articles serving as the units of analysis. The results indicate that Mediaindonesia.com constructs a narrative that supports and legitimizes Purbaya, shifting from a narrative introducing a new figure in September 2025 to one highlighting performance appreciation by February 2026. In contrast, Kompas.com presented more critical and balanced coverage, shifting from concerns over the ministerial change to a focus on the implementation of fiscal policy. This difference can be explained by variations in ownership structure and editorial orientation, as formulated in Mosco's Media Political Economy theory. The conclusion of this study confirms that media framing is influenced by ownership structure and ideological interests. Mediaindonesia.com, affiliated with a political group supporting the government, tends to construct positive and legitimizing narratives, while the more independent Kompas.com consistently maintains the critical function of journalism.

Keywords*: Framing Analysis, Narrative Shift, Minister of Finance, Online Media*

Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Turnitin

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN
Nomor:1060/K/LOD/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom
NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Vivi Nurmeylia Sari
NBI : 1152200312

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.
Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian Skripsi"
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 juli 2026

Mengetahui
Kepala Lab. Otoda,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

vivi nurmeylia

ORIGINALITY REPORT

16%	13%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	
2	mediaindonesia.com Internet Source	
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	
4	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	
6	www.akurat.co Internet Source	
7	eprints.upj.ac.id Internet Source	
8	Salam Bin Suib, Moh. Faiqurrohman, Ria Kasanova. "Konstruksi Realitas Kepemimpi Presiden Prabowo Subianto Dalam Berita Kompas.Com", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	
9	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	
10	journal.uir.ac.id Internet Source	
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	
12	123dok.com Internet Source	
13	labuhanbatu.com Internet Source	
14	jurnalfuda.iainkediri.ac.id Internet Source	
15	mesahistoricalmuseum.org Internet Source	

Lampiran 13 Lembar Perintah Revisi

Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Vivi Nurmeylia Sari
NIM : 1152200312
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at, 12 Juni 2026
Judul Skripsi : Analisis Framing Pergeseran Narasi Pemberitaan Menteri Keuangan Purbaya Pada Mediaindonesia.com dan Kompas.com

Catatan Perbaikan:

Ikuti revisi dari penguji lainnya.
SEMANGAT :).

Surabaya, 23-6-26.

Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Fransisca. B.A.C.P.

Revisi dari Dosen Penguji, 12/6.

Fransisca. B.A.C.P.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Vivi Nurmeylia Sari
NIM : 1152200312
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at, 12 Juni 2026
Judul Skripsi : Analisis Framing Pergeseran Narasi Pemberitaan Menteri Keuangan Purbaya Pada Mediaindonesia.com dan Kompas.com

Catatan Perbaikan:

Revisi bab I–5 dan penulisan.
Lampiran

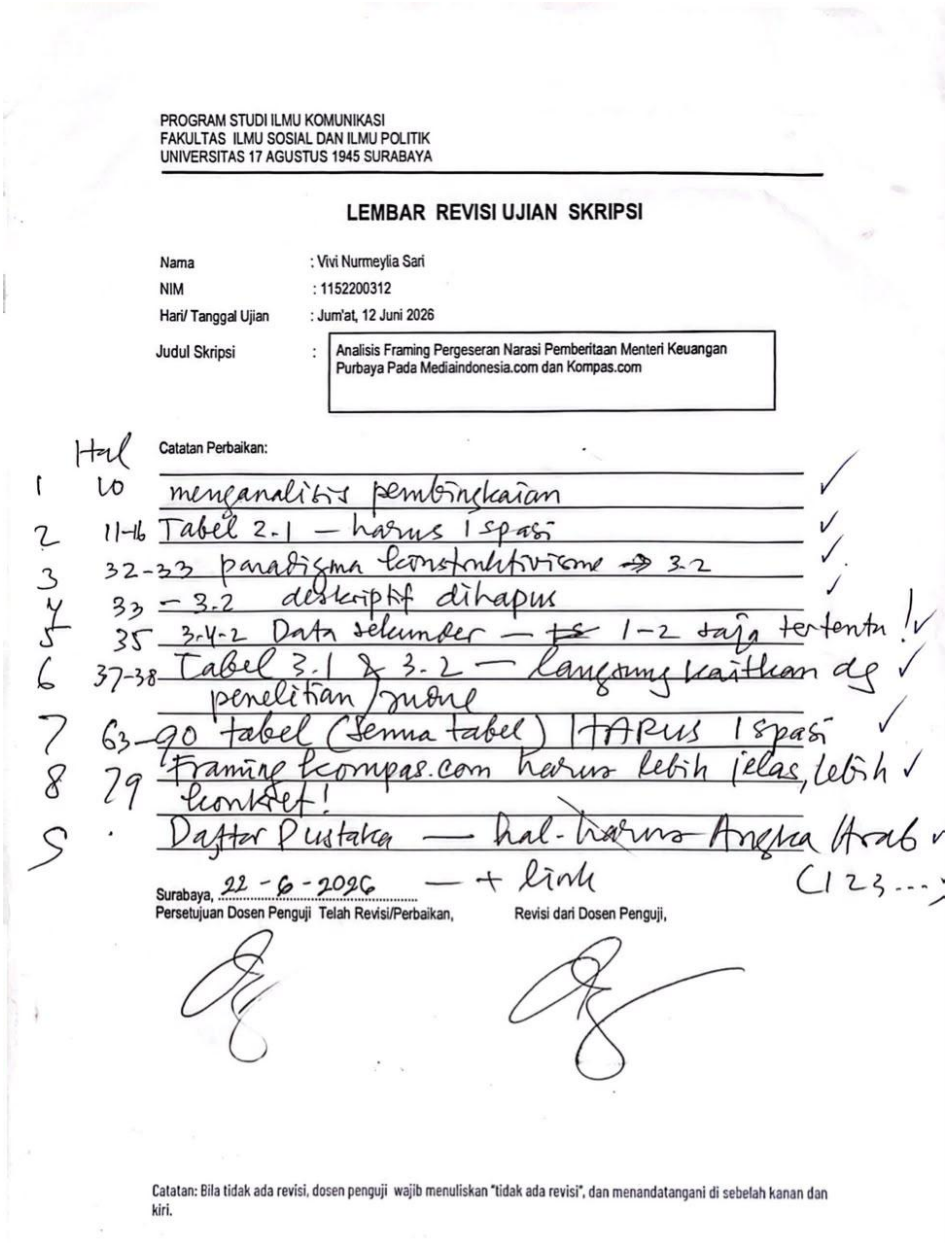
Surabaya, 26 Juni 2026
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

DEWI SRI A.R.

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Dosen Penguji 3



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Vivi Nurmeylia Sari
NIM : 1152200312
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at, 12 Juni 2026
Judul Skripsi : Analisis Framing Pergeseran Narasi Pemberitaan Menteri Keuangan Purbaya Pada Mediaindonesia.com dan Kompas.com

	Hal	Catatan Perbaikan:	
1	10	menganalisis pembingkaian	✓
2	11-16	Tabel 2.1 — harus 1 spasi	✓
3	32-33	paradigma konstruktivisme → 3.2	✓
4	33	— 3.2 deskriptif dihapus	✓
5	35	3.4.2 Data sekunder — ~~ts~~ 1-2 saja tertentu	✓
6	37-38	Tabel 3.1 & 3.2 — langsung kaitkan dg penelitian/jurnal	✓
7	63-90	tabel (semua tabel) HARUS 1 spasi	✓
8	79	framing kompas.com harus lebih jelas, lebih konkret!	✓
9	.	Daftar Pustaka — hal-harus Angka Arab + link	✓ (123...)

Surabaya, 22 - 6 - 2026

Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.